



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menjadi grand teori pada penelitian ini, Teori agensi memandang pemerintah daerah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Masyarakat atau publik berhak untuk menilai dan memberikan masukan serta mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk kepentingan bersama. Teori ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kinerja keuangan di lingkungan masyarakat serta pemerintahan. Teori keagenan memandang pemerintah daerah sebagai agen, bertindak sebagai prinsipal yang mewakili kepentingan masyarakat (Pratama *et al.*, 2024).

Menurut penelitian Natalia & Suprpto, (2023) Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat. Sebab itu, kepentingan tersebut dapat menimbulkan beberapa konflik. Hal ini menjadikan masyarakat tidak puas akan kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan pemerintah daerah lebih memilih mementingkan diri sendiri.

Demi kepercayaan terhadap pemerintah daerah, masyarakat perlu melakukan pengawasan atas pemerintah daerah demi menyelaraskan tujuan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Maka pemerintah harus



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menjalankan kewajibannya dengan mempertanggung jawabkan sumber daya yang ada kepada pemerintah melalui laporan keuangan seperti anggaran pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah. Teori keagenan berargumen bahwa untuk mengurangi konflik kepentingan, baik prinsipal (pemilik/pemberi mandat) maupun agen (pengelola/pelaksana) harus memiliki saluran akses informasi yang sama. Prinsip ini didukung oleh pentingnya mendistribusikan tanggung jawab, sehingga menciptakan sistem yang lebih kebal terhadap praktik kecurangan dan korupsi. Jadi teori agensi bagi pihak pemerintah daerah (agen) bekerja terhadap nama masyarakat (principal). Agen memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aset yang dapat memberikan peningkatan potensi peningkatan bagi prinsipal (Ardelia dkk, 2022 dalam kutipan penelitian Rosadi, 2023).

Teori Keagenan memberikan pemahaman bahwa masyarakat memberikan otoritas kepada pemerintah daerah guna mewakili dan mengelola sumber daya publik dan pemerintah bertanggung jawab mengelola keuangan daerah dan menyelenggarakan pelayanan publik demi kepentingan masyarakat luas. Periansya *et al.*, (2021) R. A. R. Putri & Amanah, (2020) dalam kutipan O. Putri *et al.*, (2025). Dalam teori keagenan, kondisi *information asymmetry* di mana agen (pemerintah) memiliki informasi yang lebih banyak daripada prinsipal (masyarakat) merupakan akar dari berbagai masalah, seperti ketidakpercayaan publik. Ketimpangan ini bisa menyebabkan izin, seperti korupsi atau pengelolaan anggaran yang tidak transparan (Aulia & Rahmawaty, 2020 dikutip O. Putri *et al.*, 2025).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada penelitian ini, teori keagenan digunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau agar lebih transparan oleh pemerintah (*agen*) untuk masyarakat sebagai *prinsipal*. Hubungan dengan teori keagenan, dimana pada dasarnya pemerintah sebagai *agen* yang mengelola kinerja keuangan daerahnya. Hubungan teori keagenan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Belanja Modal dan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu:

2.1.1.1 Hubungan Teori Kagenan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan teori keagenan, penelitian ini memiliki landasan yang relevan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah berperan sebagai *agen* yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cerminan kemampuan fiskal dan kemandirian daerah. Di sisi lain, tingginya PAD berpotensi memicu penyimpangan, seperti penyalahgunaan dana proyek untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, teori keagenan menekankan pentingnya pertanggungjawaban *agen*. Kinerja keuangan, yang diukur melalui rasio efisiensi, kemandirian, dan indikator lainnya, berfungsi sebagai alat untuk menilai apakah PAD yang tinggi dikelola dengan baik atau justru disalahgunakan. Pada dasarnya, penelitian ini bertujuan menguji kontribusi PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah apakah berdampak positif atau negatif. Dengan demikian, masyarakat sebagai *prinsipal* dapat turut serta mengawasi dan menilai kinerja tersebut.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.1.1.2 Hubungan Teori Keagenan dengan Belanja Modal

Belanja modal merepresentasikan keputusan strategis pemerintah daerah sebagai agen dalam mengalokasikan dana untuk aset tetap, seperti infrastruktur publik dan peralatan, yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Namun, pengelolaan aset-aset ini rentan terhadap masalah keagenan antara pemerintah daerah (agen) dan masyarakat (prinsipal). Terdapat potensi konflik kepentingan ketika pemerintah daerah memprioritaskan proyek-proyek berskala besar yang dapat memberikan keuntungan pribadi, alih-alih yang paling dibutuhkan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tingginya belanja modal benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah, yang dalam hal ini diukur melalui pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila belanja modal yang tinggi ternyata tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan, hal tersebut dapat diindikasikan sebagai masalah keagenan, berupa pemborosan dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran.

2.1.1.3 Hubungan Teori Keagenan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan, yang diukur melalui berbagai rasio seperti efisiensi, kemandirian dan aktivitas berfungsi sebagai instrumen pengawasan bagi para prinsipal seperti masyarakat, BPK, dan DPRD. Melalui evaluasi kinerja keuangan ini, para prinsipal dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah sebagai agen dalam mengelola sumber daya



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

daerah. Pada dasarnya, kinerja keuangan yang kuat menjadi indikator bahwa konflik keagenan telah dikelola dengan baik. Sebaliknya, kinerja keuangan yang lemah dapat mengisyaratkan adanya penyimpangan atau praktik yang tidak sesuai dengan amanah yang diberikan.

Sebagai *grand theory*, teori keagenan dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk menganalisis hubungan antara PAD, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan pemerintah daerah. Lebih mendalam, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika relasi antara masyarakat selaku prinsipal dan pemerintah daerah selaku agen dalam tata kelola keuangan daerah. Dengan posisi tersebut, teori keagenan berperan sebagai fondasi analitis yang memberikan kedalaman interpretasi, sehingga penelitian ini tidak sekadar melakukan analisis korelasi permukaan.

2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Fahmi (2012) dalam kutipan Fauzan & Rusdiyanti, (2022) menyatakan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Menurut Sutrisno (2009) dalam penelitian Raju Maulana *et al.*, (2024) menjelaskan tentang kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

benar. Menurut Pratama *et al.*, (2024) Kinerja keuangan adalah istilah yang tepat dalam menggambarkan posisi keuangan organisasi pada waktu tertentu. Pengukuran diterapkan menggunakan ukuran seperti kecukupan modal, likuiditas dan profabilitas perusahaan agar mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi pemerintah daerah terkait penggunaan, pengelolaan dan pelaksanaan operasionalnya. Menurut Fernandes & Putri, (2022) Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam menjalankan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan optimal untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi dalam daerah.

Kinerja keuangan adalah ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam menjalankan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan optimal untuk mempertahankan layanan yang diinginkan (Rahmadina, 2024). Kinerja keuangan adalah ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam menjalankan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan optimal untuk mempertahankan layanan yang diinginkan (Mardiana, 2025). Menurut Fahmi (2012) dalam Rustiyani & Barus, (2023) Dalam membahas kinerja keuangan suatu pemda, salah satunya mengacu pada temuan atau evaluasi suatu kajian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan prinsip-prinsip penerapan keuangan dalam menjalankan usaha.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Mardiasmo, (2002) dikutip dalam (Rahmadina, 2024) menjelaskan bahwa tujuan umum laporan bagi organisasi pemerintah adalah:

- a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban (*Accountability*) dan pengelolaan (*Stewardship*).
- b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

Sedarmayanti (2007) dalam kutipan Hafizi & Amalia, (2022) menyatakan kinerja ialah hasil kerja seorang karyawan, proses manajemen, atau organisasi secara keseluruhan, yang dapat diukur dan ditunjukkan dengan jelas. Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan kinerja keuangan ialah pandangan kemampuan organisasi atau instansi untuk mengelola sumber daya dari pengambilan hingga penyaluran. Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah adalah menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan terhadap sumber daya yang dikelolanya. Menurut penelitian Hastuti & Nasution, (2024) Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan terdapat beberapa ukuran kinerja yang dapat diperhitungkan diantaranya rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan.

Utami (2023) dalam kutipan (Hafizi & Amalia, 2022) mengatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan rasio



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

keuangan APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, menggunakan rasio efisiensi untuk mengukur kinerja keuangannya. Semakin tinggi rasio, semakin turun kinerja keuangannya dan sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio efisiensinya semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat penghematan anggaran yang telah dilakukan, hasil dari rasio ini tidak bersifat absolut tetapi bersifat relatif, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini dan suatu Pemerintah Daerah telah melaksanakan efisiensi belanja apabila rasio ini kurang dari 100%, namun jika rasio lebih dari 100% berarti tidak efisien (Mahmudi, 2016 dalam kutipan Hafizi & Amalia, 2022). Selain rasio efisiensi, ada juga rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio aktivitas yang dijelaskan sebagai berikut:

2.1.2.1 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi tersebut menggambarkan perbandingan antara besaran biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh alokasi Anggaran Dana Daerah dengan realisasi Dana Daerah yang diterimanya.

Rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan} \times 100\%}$$

Rasio efisiensi memiliki kriteria sebagai berikut:



Tabel 2. 1

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria
>100%	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien

Sumber: Abdul Halim (2007) dalam (Pundissing & Pagiu, 2021)

2.1.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Menurut Halim (2007) dalam Pundissing & Pagiu, (2021) rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman} \times 100\%}$$

Rasio efisiensi memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Persentase	Kriteria
0% - 25%	Rendah sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber: Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh (2015) dalam (Pundissing & Pagiu, 2021)

2.1.2.3 Rasio Aktivitas

Menurut Abdul Halim (2007) dalam kutipan Pundissing & Pagiu, (2021) Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

secara optimal. Dalam penelitian ini menggunakan belanja modal sebagai perhitungan. Rasio aktivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja Daerah}}{\text{Belanja Modal} \times 100\%}$$

Rasio aktivitas memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Kriteria Rasio Aktivitas

Persentase	Kriteria
0% - 50%	Tidak Baik
50% - 100%	Baik

Sumber: Abdul Halim (2007) dalam Pundissing & Pagiu, (2021)

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Fernandes & Putri, 2022) Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian penting dari pengakuan teritorial yang kemudian berperan dalam kemajuan wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam Kota. Pendapatan asli daerah adalah sejumlah uang yang didapat oleh suatu wilayah melalui pengumpulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. Apabila pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat maka juga berdampak pada kinerja keuangan daerah. Sebab peningkatan pendapatan daerah menjadikan kinerja keuangan daerah meningkat terhadap pemerintah daerah tersebut.

Sedangkan Mardiasmo, (2002) dalam penelitian (Hastuti & Nasution, 2024) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang sumbernya dari daerah tersebut. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari hasil



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Pratiwi, 2018) dalam penelitian (Hastuti & Nasution, 2024). Menurut Halim (2001) pada penelitian (Natalia & Suprpto, 2023) PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2013) Natalia & Suprpto, (2023) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Contohnya meliputi lahan daerah, alat, mesin, gedung, sarana dan prasarana publik, bangunan pemerintah dan sebagainya yang memiliki nilai untuk waktu yang lama. Belanja modal adalah biaya dari anggaran pemerintah negara untuk mendapatkan aset permanen maupun aset lainnya yang bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat atau publik.

Menurut Pratama *et al.*, (2024) Ketika pemerintah membelanjakan uang lebih banyak daripada yang telah disisihkan untuk kapitalisasi minimum aset tetap atau aset lainnya, maka hal ini disebut sebagai belanja modal. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya (Natalia & Suprpto, 2023).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh provinsi, kabupaten, atau kota. Ini termasuk urusan yang harus dilakukan dan pilihan, serta urusan yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan secara hukum (Fatimah Az Zahrah *et al.*, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian Dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Dhea Putri Pratama, Ira Grania Mustika & Angga Pramadi Karpiana (Pratama et al., 2024)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota pontianak tahun 2013-2022 Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research (JISAMAR)	X1: PAD X2: Belanja Modal Y: Kinerja Keuangan SPSS 26 Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi	PAD dan Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
2	Joni Fernandes & Siliviani Putri (Fernandes & Putri, 2022)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun 2017-2020 Jurnal REV (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP)	X1 : PAD X2: Belanja Modal Y: kinerja keuangan daerah Eviews 9 Regresi Data Panel (Random Effect Model), Uji Chow, Uji Hausman	PAD berpengaruh positif signifikan, belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
3	Novi Natalia & Wendi Suprpto (Natalia & Suprpto, 2023)	Pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota provinsi sumatera utara	X1: PAD X2: Dana Perimbangan X3: Belanja Modal Y: Kinerja Keuangan Eviews 7 Regresi Data Panel (Fixed Effect Model), Uji Chow, Uji Hausman	PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan, Belanja Modal tidak berpengaruh.



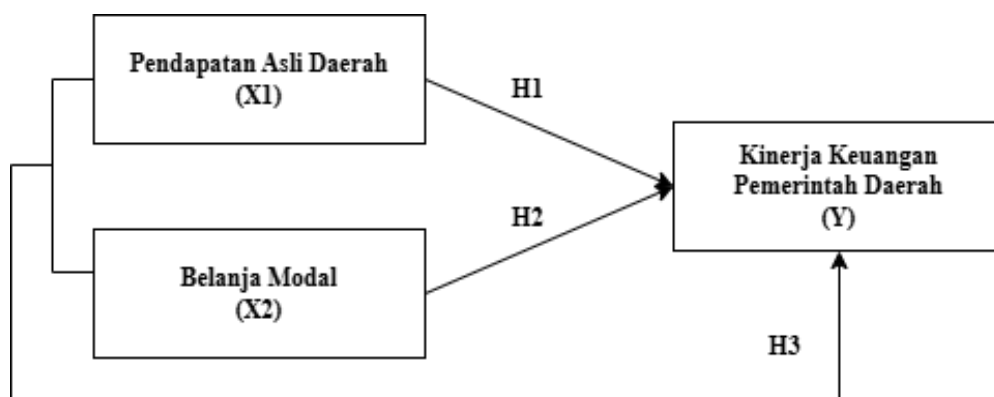
No	Nama Peneliti	Judul Dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian Dan Alat Analisis	Hasil Penelitian
4	Erviana Putri, Raju Maulana Dan Sri Hidayanti (E. Putri et al., 2024)	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Jurnal Mahasiswa Ekonomi Bisnis (JMEB), Vol. 1, No. 2, Juni 2024	X1: Rasio Efektivitas X2: Rasio Pertumbuhan Y: Kinerja Keuangan Analisis deskriptif kualitatif dengan rumus rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan	Rasio Efektivitas dikatakan efektif mencapai 100% dan Rasio Pertumbuhan pendapatan mendapat hasil <25% dikatakan rendah.
5	Noviana Sri Hastuti & Dito Aditia Darma Nasution (Hastuti & Nasution, 2024)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara) Jurnal riset akuntansi dan bisnis (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	X1: PAD X2: Belanja Modal Y: Kinerja Keuangan (Rasio Efisiensi) SPSS 25 Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji F, Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas	PAD berpengaruh positif signifikan, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan.

Sumber: Beberapa Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan dasar dari konsep dalam penelitian yang bertujuan sebagai pegangan atau pedoman dalam mengumpulkan sumber-sumber data.

Kerangka pemikiran terdapat teori yang digunakan peneliti untuk membedah permasalahan sebagai objek penelitian yaitu :



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan respon sementara terhadap rumusan masalah dalam suatu studi, inijuga dapat diartikan sebagai hasil awal dalam penelitian karena jawaban yang diberikan hanya berfungsi sebagai landasan pada teori yang berkaitan dan bukan sebagai fakta yang di dapat dari pengumpulan data.

Berdasarkan latar belakang masalah dan teori yang berkaitan, penulis mengemukakan hipotesis sementara sebagai berikut :

1. H1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Periode 2021-2024.
2. H2 : Diduga Belanja Modal Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Periode 2021-2024
3. H3 : Diduga Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Periode 2021-2024.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.5 Variabel Penelitian

Berdasarkan uraian definisi konseptual di atas maka diperoleh variabel yang dijelaskan sebagai berikut :

2.5.1 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat). Menurut Sugiyono, (2017) dalam kutipan Nurdianti, (2025) variabel independen merupakan faktor yang menyebabkan perubahan atau kemunculan variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal yang dimana masing-masing dikembangkan menjadi (X).

2.5.2 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2018), variabel dependen atau variabel terikat sering disebut juga sebagai variabel output, kriteria, maupun konsekuensi. Variabel ini merupakan variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi faktor akibat adanya variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan peneliti adalah variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah yang dikembangkan menjadi (Y).

2.5.3 Konsep Operasional Variabel

Tabel 2. 5
Konsep Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Menurut Halim (2010) dalam kutipan Rohanda & Azhar, (2023) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri	$PAD = Pajak\ Daerah + Retribusi\ Daerah + Hasil\ Pengelolaan\ Kekayaan\ Daerah + Lain-Lain\ PAD\ Yang\ Sah$	Rasio



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
	yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Belanja Modal (X2)	Berdasarkan UU No.71 Tahun 2010 dikutip dalam Rosadi, (2023), Belanja Modal yaitu anggaran belanja dalam memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang mempunyai jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.	Belanja Modal = $\frac{\text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya}}{\text{Total Belanja}}$	Rasio
Kinerja Keuangan pemerintah daerah (Y)	Menurut (Nursamsia <i>et al.</i> , 2020) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sejauh mana kegiatan keuangan daerah, termasuk pendapatan dan belanja daerah telah dilakukan dengan menggunakan indikator keuangan yang ditentukan oleh ketentuan politik atau hukum untuk suatu periode anggaran.	Rasio Efisiensi = $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan} \times 100\%}$ Rasio kemandirian = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman} \times 100\%}$ Rasio aktivitas = $\frac{\text{Total Belanja Daerah}}{\text{Belanja Modal} \times 100\%}$	Rasio

Sumber: Data Diolah, 2026